



ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

(Studi: Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)

Jessica Caroline Purba^{1*}

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Murni Teguh , Jl. Sriwijaya,
Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, 21144

*Penulis Korespondensi: purbajessica74@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the management of financial reports at the Siantar District Office using Government Accounting Standards (SAP) as the main reference framework in realizing Financial Transparency and Accountability. The research method used is a qualitative descriptive study with an observational analysis approach, financial report documentation and interviews with relevant parties in Siantar District. The results of the study indicate that the implementation of SAP has been effective as a guideline in the preparation of transparent, accountable, orderly, and accurate financial reports, with complete and systematic financial documents. However, there are limitations in terms of information disclosure to the public caused by technological constraints, internal policies, and human resource capacity, so that transparency to the public is not optimal. Financial accountability in Siantar District is implemented with strict procedures and regular supervision through audits by the inspectorate and the Supreme Audit Agency (BPK). Although there has been positive progress, improvements in literacy, transparency, and information disclosure mechanisms are needed to make supervision more participatory and credible. Overall, financial management in Siantar District demonstrates a strong commitment to transparent, accountable, and trustworthy financial governance to improve the quality of public services.*

Keywords: : Government Accounting Standards, Transparency, Accountability

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan laporan keuangan di Kantor Kecamatan Siantar dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai kerangka acuan utama dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis observasi, dokumentasi laporan keuangan dan wawancara terhadap pihak terkait di Kecamatan Siantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP telah efektif menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, teratur, dan akurat, dengan dokumen keuangan yang lengkap dan sistematis. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat yang disebabkan oleh kendala teknologi, kebijakan internal, dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga transparansi kepada masyarakat belum optimal. Akuntabilitas keuangan di Kecamatan Siantar dilaksanakan dengan prosedur yang ketat dan pengawasan teratur melalui audit dari inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun terdapat kemajuan positif, diperlukan peningkatan literasi, transparansi, dan mekanisme keterbukaan informasi agar pengawasan menjadi lebih partisipatif dan kredibel. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Kecamatan Siantar menunjukkan komitmen yang kuat untuk menuju tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas

LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik yang baik. Dalam konteks pemerintahan, kedua aspek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik untuk menciptakan *good government governance*. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hadir sebagai instrumen yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dengan cara yang

dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Jika Standar Akuntansi Pemerintahan tidak diterapkan, tentu dapat berdampak buruk pada kualitas informasi laporan keuangan (Zuliyana et al., 2023).

Kantor Kecamatan Siantar merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jl. Asahan KM 4 Dolok Marlawan. Pada Kantor Camat Siantar, tentu memiliki wewenang dalam mengelola laporannya. Setelah peneliti melakukan wawancara melalui Bendahara Keuangan, menyatakan bahwa pengakuan pendapatan dan belanja yang ada di Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun disajikan didalam Laporan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PEMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun yang menjadi permasalahan, Kantor Camat Siantar tidak menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya, dengan alasan bahwa keuangan yang dianggarkan merupakan untuk memenuhi kebutuhan di Kantor kecamatan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara Kecamatan Siantar, dikemukakan bahwa menurut pemahaman dan paradigma mereka bahwa transparansi itu tidaklah mutlak penting. Selain itu, Kantor Kecamatan Siantar juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat peraturan yang mengatur kewajiban untuk melaksanakan transparansi dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan amanat Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan daerah. Pada dasarnya, transparansi dalam hal pengelolaan anggaran dapat membantu pemerintah kecamatan Siantar untuk mengungkapkan wujud kegiatan yang dilaksanakan, visi misi apa yang ingin dicapai, dan komitmen-komitmen baik apa yang akan dilakukan. Informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan berperan dalam memberikan pengawasan.

KAJIAN TEORITIS

A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sekumpulan prosedur dan elemen yang dirancang untuk melaksanakan fungsi akuntansi di dalam organisasi pemerintahan (Mutiaro et al., 2022). Tujuan lain dari SAP adalah menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsi administratif dengan berpegang teguh pada asas keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, serta keadilan. Oleh karena itu, untuk membangun sistem yang efektif, diperlukan perubahan dan kemajuan, terutama dalam akuntansi pemerintahan (Yogi Pranata, 2024).

B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa posisi keuangan dan riwayat transaksi sebuah entitas pelaporan disajikan secara sistematis melalui apa yang disebut dengan laporan keuangan (Saputra, 2020). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9, ditujukan untuk menyajikan realisasi anggaran, posisi keuangan, dan arus kas entitas secara transparan. Informasi ini sangat berguna bagi publik atau pengguna dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Intinya, laporan tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara.

C. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah cakupan luas dari hak dan tanggung jawab pemerintah daerah yang bisa diukur secara finansial. Ini melibatkan aset berupa uang maupun properti yang menjadi hak milik daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Hamid, 2020)

D. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam mendistribusikan data yang akurat serta relevan bagi setiap pihak yang berwenang. Jika ditarik ke dalam ranah finansial, konsep ini mengharuskan penyajian informasi yang utuh dan sederhana agar publik maupun pemangku kepentingan dapat mencermati bagaimana sumber daya dikelola. Dengan keterbukaan seperti ini, pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam memanfaatkan anggaran menjadi jauh lebih optimal (Nurhadianto & Khamisah, 2020). Transparansi keuangan daerah adalah elemen kunci demi mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih baik, terutama untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas memerlukan adanya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan diukur. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan serta melaporkan keberhasilan pengelolaan tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas yang baik membuat pemerintah daerah lebih transparan (Tahir et al., 2020).

F. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan rencana, pengalokasian anggaran, hingga tahap pengawasan. Tanggung jawab ini ditujukan kepada masyarakat serta berbagai sektor publik guna menunjukkan bagaimana hasil kerja finansial tersebut dicapai (Makalalag et al., 2023). Tolak ukur pertanggungjawaban finansial di tingkat daerah umumnya bersandar pada empat jenis indikator, meliputi kepatuhan terhadap hukum dan kejujuran, ketepatan sasaran kebijakan, keberhasilan implementasi program, serta akuntabilitas pada setiap tahapan proses yang dilalui (Mardiasmo, 2021).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah analisis standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data triangulasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan dua jenis data:

1. Sumber Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dengan berinteraksi langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, khususnya staf bagian pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Siantar, Pangulu dan Gamot pada Nagori Lestari Indah sebagai salah satu Nagori pada Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

2. Sumber Data Sekunder

Peneliti menghimpun informasi sekunder dari beragam sumber pustaka dan rekaman data yang telah ada sebelumnya. Hal ini mencakup kompilasi artikel, jurnal penelitian, hingga naskah dokumen dan arsip tertentu, baik yang telah dipublikasikan ke publik ataupun yang masih tersimpan sebagai catatan internal entitas terkait.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terstruktur (Sugiyono, 2023). Peneliti menyusun analisis data menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Deskriptif Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

A. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Laporan Keuangan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010

Laporan Keuangan Kecamatan Siantar menyajikan data dan informasi selama periode bersangkutan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP menetapkan adanya tujuh jenis laporan keuangan wajib, namun tidak semua komponen tersebut harus dilaporkan oleh tiap entitas. Terdapat pengecualian untuk beberapa laporan tertentu bagi unit-unit pelaporan, yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Arus Kas terbatas pada entitas yang memiliki peran dalam tata kelola perbendaharaan umum;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan otoritas khusus bagi Bendahara Umum Negara serta unit pelaporan yang bertanggung jawab atas konsolidasi laporan keuangan terkait.

Unit perbendaharaan umum di sini adalah instansi yang memegang mandat resmi sebagai bendahara umum atau pihak yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum, baik di level negara maupun daerah (PP NO 71 TAHUN, 2020).

Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang

semuanya disusun berdasarkan ketentuan SAP berbasis akrual yang mengakui transaksi saat terjadi tanpa memperhatikan arus kas keluar masuk. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan yang lengkap dan transparan mengenai sumber daya, anggaran pelaksanaan, posisi keuangan, serta hasil kinerja entitas informasi pada periode pelaporan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Penulis setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Camat Siantar Kab. Simalungun telah memuat akun-akun utama seperti akun Pendapatan dan akun Belanja. Namun, Kantor Camat Siantar tidak mencantumkan akun Transfer dan akun Pembiayaan pada Pos Laporan Realisasi Aggarannya. Kecamatan tidak menyajikan akun tersebut dalam LRA biasanya karena tidak ada transaksi terkait kedua akun tersebut yang terjadi di tingkat kecamatan. Secara umum, LRA mencakup akun Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan, sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, untuk kecamatan yang tidak menerima pendapatan pajak daerah atau tidak melakukan transaksi transfer dana dari atau ke entitas lain, maka akun Transfer dan Pembiayaan tidak disajikan dalam LRA. Namun, Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun sebagai salah satu instansi yang bersangkutan telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan merujuk pada format PP Nomor 71 Tahun 2010, namun dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian. Instansi tersebut belum mencantumkan akun-akun spesifik yang sebenarnya telah diamanatkan dalam ketentuan pemerintah tersebut.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) pada Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun meliputi akun Pendapatan, Beban, dan Surplus defisit Dari Kegiatan Non Operasional dan akun Pos Luar Biasa. Dalam menjalankan kewajiban pelaporannya, Kantor Camat Siantar di Kabupaten Simalungun telah menyusun Laporan Operasional dengan mengacu pada sistematika serta elemen-elemen yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun terdiri dari Ekuitas, Surplus/Defisit –LO, Koreksi Ekuitas Kewajiban untuk diskonsolidasikan, dan Ekuitas Akhir. Terkait penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Kantor Camat Siantar di Kabupaten Simalungun telah mengadopsi sistematika serta komponen-komponen yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa instansi tersebut berupaya mengikuti standar baku akuntansi pemerintahan yang berlaku.

d. Neraca

Neraca pada Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun formatnya yang terdiri dari Aset lancar, Aset tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun telah menyusun Neraca dengan mengikuti kerangka serta komponen yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Mengenai penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pihak Kantor Camat Siantar di Kabupaten Simalungun telah mengikuti sistematika serta elemen-elemen yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Secara keseluruhan, Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun telah secara konsisten dan komprehensif menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan mereka, yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan pedoman peraturan yang berlaku, namun juga mampu mencerminkan tingkat akuntabilitas keuangan yang tinggi. Penyusunan laporan keuangan ini mencakup beberapa komponen utama yang wajib ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap komponen laporan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi berbasis akrual, di mana semua transaksi keuangan diakui dan dicatat pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan arus kas masuk maupun keluar. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan memberikan gambaran yang lebih lengkap, transparan, dan akurat tentang sumber daya keuangan, anggaran pelaksanaan, posisi keuangan, serta hasil kinerja yang dicapai Kantor Camat Siantar selama periode pelaporan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010

Dari 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun hanya memuat 8 PSAP yang sudah sesuai dengan laporan keuangan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dilihat dari hasil Laporan Keuangan.

B. Transparansi

Ciri-ciri pemerintahan yang transparan meliputi akses akuntabilitas yang terbuka, kemudahan masyarakat dalam laporan keuangan, publikasi laporan keuangan secara luas, hak mendapatkan informasi hasil audit, serta tersedianya data kinerja pemerintahan yang jelas dan mudah diakses oleh publik (Permata et al., 2025). Indikator penerapan transparansi berdasarkan Undang undang No 14 Tahun 2008 (Sholeha et al., 2024) dan realisasinya pada Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

Tabel 1
Transparansi pada Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

No	Indikator Transparansi	Realisasi	
		Ya	Tidak
1.	Pemerintah menyediakan dokumen anggaran secara terbuka untuk publik melalui situs resmi atau laporan tahunan.		√
2.	Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran atau pemantauan pelaksanaannya.		√
3.	Menyediakan laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi.	√	

Transparansi di Kecamatan Siantar saat ini menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Meskipun pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan menyediakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh lembaga independen, yang memastikan akurasi dan kepatuhan

terhadap peraturan, namun keterbukaan dalam penyediaan dokumen anggaran kepada publik maupun pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran masih belum terealisasi.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan adalah suatu elemen penting dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Menurut Ihyaul Ulum, akuntabilitas keuangan harus didukung oleh tiga komponen utama, yaitu integritas keuangan, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan UU yang berlaku (Puspitawati, 2021). Tolak ukur dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2021), dan realisasinya pada Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun terdiri dari 4 jenis indikator, yaitu : Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, dan Akuntabilitas Proses. Dari 4 Indikator yang telah disebutkan, Peneliti hanya menggunakan 3 indikator, yaitu Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, dan Akuntabilitas Proses.

Pembahasan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

A. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini krusial untuk menjamin sinkronisasi format dan isi laporan, sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan struktur antara satu entitas daerah dengan entitas daerah lainnya (Frihatni et al., 2021). Keberadaan standar tersebut juga berperan penting dalam menyederhanakan proses audit yang dilakukan oleh BPK. Oleh karena itu, dalam catatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan SAP khususnya Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang juga merupakan bagian dari instansi pemerintah.

Tabel 2

Rangkuman hasil wawancara terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
1.	Bapak M. Iqbal, S.STP, M.SP sebagai Camat Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	Kecamatan Siantar menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi, ketertiban, dan akuntabilitas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan pedoman keuangan daerah. Camat Siantar menekankan pentingnya SAP agar pengelolaan keuangan sesuai aturan dan dapat diaudit dengan baik.
2.	Ibu Melida Nora Saragih, SE, AK, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta Bendahara rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah kabupaten untuk menghadapi perubahan kebijakan agar pelaksanaan SAP optimal. Dalam praktiknya, Kecamatan Siantar menggunakan aplikasi SIPD Penatausahaan yang memudahkan input, pengelolaan, dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara
3.	Ibu Junita W. Damanik, SH sebagai Bendahara Kantor	

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
	Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	transparan dan terakses oleh pejabat terkait. Namun kendala yang dihadapi adalah gangguan jaringan internet dan error aplikasi yang menghambat kelancaran pekerjaan dan pelaporan keuangan.

B. Transparansi

Dalam mencapai transparansi, sebuah organisasi harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan serta tata kelola secara akurat, lengkap, dan tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. Transparansi ini tidak berarti bahwa seluruh informasi harus dapat diakses oleh masyarakat umum, melainkan bahwa informasi yang relevan dan penting harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan mudah untuk dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Tabel 3
Rangkuman hasil wawancara terkait Transparansi di Kecamatan Siantar
Kabupaten Simalungun

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
1.	Ibu Melida Nora Saragih, SE,AK,M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan transparansi dengan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan atau pihak yang membutuhkan, baik berupa data, prosedur, fakta, maupun jenis informasi lainnya. Tetapi, sangat disayangkan fungsi transparansi dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tidak diterapkan dalam Kecamatan Siantar. SAP membantu memperjelas proses pelaporan internal, namun tanpa adanya akses bagi masyarakat, tentu transparansi publik masih jauh dari harapan ideal. Partisipasi masyarakat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tingkat kecamatan. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud apa bila kecamatan tidak menyediakan akses informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Alternatifnya, komunikasi transparan dilakukan melalui grup bersama yang melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat di 17 nagori, sehingga koordinasi dan pengawasan berjalan efektif. Kecamatan hanya mengelola anggaran operasional rutin, sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab desa dan dinas terkait. Masyarakat dan nagori sendiri menilai transparansi Kecamatan cukup baik dalam hal akses
2.	Ibu Junita W. Damanik, SH sebagai Bendahara Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	
3.	Bapak Rudianto Damanik sebagai Pangulu Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun	

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
4.	Bapak Fakistan Situmorang sebagai Gamot di Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun	informasi. Kendati demikian, keterbatasan teknologi, kebijakan, dan SDM masih menghambat penerbitan laporan keuangan yang lebih terbuka. Evaluasi dan peningkatan sistem transparansi keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi standar akuntabilitas pemerintahan yang ideal. Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun belum mampu menyediakan sarana publikasi laporan keuangan kepada masyarakat luas, sehingga menghambat pencapaian transparansi sesuai harapan SAP. Kesimpulannya, Kecamatan Siantar sudah menjalankan transparansi melalui komunikasi terbuka dan koordinasi yang baik, namun masih perlu pengembangan sistem publikasi laporan keuangan yang formal dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang diharapkan.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan. Tanpa adanya mekanisme pemeriksaan yang menyeluruh, keseimbangan dalam pengambilan keputusan, serta adanya konsekuensi yang tegas atas setiap kesalahan yang terjadi, maka kewenangan pemerintah dalam hal pelaporan keuangan tidak akan mampu dipertahankan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas harus diimplementasikan dengan serius untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar (Mardiasmo, 2021)

Tabel 4
Rangkuman hasil wawancara terkait Akuntabilitas di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
1.	Bapak M. Iqbal, S.STP, M.SP sebagai Camat Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	Secara keseluruhan, mekanisme akuntabilitas di Kecamatan Siantar berjalan efektif melalui penerapan SAP yang konsisten, audit berkala yang mendalam, penanganan temuan secara serius, serta penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan. Hal ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah kecamatan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan tata kelola keuangan, dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.. SAP menyediakan pedoman dan standar yang jelas dalam pencatatan serta pelaporan keuangan, sehingga setiap proses keuangan terdokumentasi secara sistematis dan terstruktur. Hal ini mempermudah proses audit dan pengawasan, sekaligus
2.	Ibu Melida Nora Saragih, SE,AK,M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	
3.	Ibu Junita W. Damanik, SH sebagai Bendahara	

**ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

No	Narasumber	Rangkuman Hasil Wawancara
	Kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.	meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kecamatan Siantar secara rutin menjalani audit oleh inspektorat kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu di awal dan akhir tahun. Hasil audit tersebut menjadi pijakan penting bagi kecamatan untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan, sehingga tata kelola keuangan dapat terus diperbaiki dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan kesalahan atau temuan dalam proses pengelolaan keuangan, seperti pemberian izin yang tidak sesuai aturan, pihak kecamatan tidak bersedia melakukan koreksi dan evaluasi lengkap. Seluruh temuan dilaporkan secara transparan kepada instansi pengawas dan atasan terkait, disertai langkah-langkah tindak lanjut guna mencegah kesalahan yang sama terulang di masa depan. Sikap responsif dan bertanggung jawab ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masyarakat. Dalam hal pengelolaan belanja, Kecamatan Siantar menerapkan prosedur yang ketat dan sesuai regulasi, mulai dari proses permintaan resmi barang atau jasa, bukti penerimaan yang sah, hingga mekanisme pembayaran yang dilakukan secara terkontrol melalui sistem aplikasi CMS Bank Sumut. Camat sebagai Pengguna Anggaran juga mengawasi seluruh proses tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kantor Kecamatan Siantar telah menyusun laporan keuangan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dengan penyajian yang lengkap dan sistematis, sehingga mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan.
2. Keterbukaan informasi masih terbatas karena laporan keuangan belum dapat diakses publik secara luas, hanya untuk pihak internal tertentu.
3. Akuntabilitas keuangan sudah berjalan cukup baik melalui penerapan SAP, pengawasan, dan prosedur yang tertib, meskipun masih perlu perbaikan pada aspek transparansi.

B. Saran

1. Kecamatan Siantar sebaiknya melengkapi seluruh komponen SAP (12 PSAP) agar penerapan standar akuntansi lebih optimal.
2. Perlu pengembangan sistem informasi keuangan berbasis elektronik dan kebijakan keterbukaan informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan akuntabilitas kebijakan perlu dilakukan melalui transparansi informasi dan komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Frihatni, A. A., Nirwana, N., & Syamsuddin, S. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 229–239. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Penerbit GARIS KHATULISTIWA (Anggota IKAPI).
- Makalalag, F. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 1308–1318. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47157>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 582–591.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Permata, D. A., Afifudin, A., & Mawardi, M. C. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Konsep Value for Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi Pada BPKA dan BAPPELITBANGDA Kota Pasuruan). *E. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 1131–1141.
- PP NO 71 TAHUN, 2010. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Puspitawati, L. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*.
- Saputra, R. (2020). *ANALISIS AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II BANDAR KLIPPA TANJUNG MORAWA*. UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
- Sholeha, I. N., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Sisdianto, E., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *Analisis praktik akuntansi syariah terhadap transparansi laporan keuangan daerah kota bandar lampung*. 1(4), 387–400.
- Sugiyono, P. D. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R & D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA, cv.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 20–29.
- Yogi Pranata. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Implementasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>
- Zuliyana, S., Mawaddah, A., & Hartati, R. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(1), 11–33. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i1.8539>